

El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga

<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ussrah/index>

Vol.1 No.2 Juli-Desember 2018

ISSN: 2549 – 3132 || E-ISSN: 2620-8083

Praktik Ta'liq Talak di Negeri Perak Ditinjau Menurut Hukum Islam

Edi Darmawijaya

Nurul Mahfuzah Binti Ahmad Nordin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: Mahfuzahnordin274@gmail.com

Abstrak

Ta'liq talak dalam kajian hukum nikah adalah berkenaan dengan janji nikah yang diucapkan suami pada saat setelah akad nikah dilangsungkan. Pelanggaran janji ta'liq berakibat pada terbukanya peluang bagi isteri untuk menggugat cerai suami. Praktik ta'liq talak ini agaknya menjadi satu upaya agar hubungan pernikahan tetap berlangsung secara baik dengan adanya ikrar janji suami untuk selalu memenuhi hak isteri. Namun, ta'liq talak seringkali dijadikan alasan bercerai, hal ini seperti yang dilakukan dalam masyarakat Negeri Perak. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana praktik ta'liq talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak, bagaimana akibat hukum pelanggaran ta'liq talak terhadap kelangsungan hubungan pernikahan di Negeri Perak, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik ta'liq talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Data-data yang telah terkumpul dianalisis dengan cara deskriptif-analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ta'liq talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak dilakukan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, disaksikan oleh dua orang saksi, penghulu, dan wali dari pihak perempuan. Pembacaan sighthat ta'liq talak ini wajib dilakukan untuk tiap-tiap pasangan yang menikah di dalam wilayah hukum Negeri Perak, yang isinya berjanji untuk memenuhi hak-hak isteri. Akibat hukum pelanggaran ta'liq talak di Negeri Perak berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan pernikahan. Isteri yang tidak ridha dengan pelanggaran tersebut dapat menggunakan haknya untuk mengajukan cerai gugat suami kepada Mahkamah Syariah sebagaimana legalisasinya diakui dalam Seksyen 50-1 Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004. Praktik ta'liq talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak telah sesuai dengan norma hukum Islam. Praktik ta'liq talak tersebut bagian dari usaha untuk melindungi hak-hak perempuan yang notabene rentan menjadi pihak tersubordinat. Keberadaan ta'liq talak sesuai dengan konsep masalah.

Kata Kunci: Praktik, Ta'liq Talak, Hukum Islam.

Pendahuluan

Pernikahan adalah akad dan ikatan suci, kokoh, atau kuat (*misāqan ghalīzan*) yang mengikat antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku secara Islam, masing-masing keduanya dapat saling tolong-menolong, dengan akad tersebut pula keduanya dihalalkan untuk melakukan persetubuhan, serta timbulnya hak dan kewajiban masing-masing keduanya.¹ Sebagai ikatan yang kokoh dan bersifat suci, maka selayaknya pasangan suami isteri wajib mempertahankan keutuhan tali pernikahan tersebut sedapat mungkin, caranya bermacam-macam, bisa dengan sikap saling menghargai satu sama lain, tidak memaksakan kehendak, dan memenuhi hak dan kewajiban yang telah ditetapkan syarak kepada masing-masing keduanya, serta dibenarkan pula sesaat setelah akad nikah membuat semacam perjanjian berupa pelaksanaan kewajiban dan konsekuensinya ke depan.

Perspektif pernikahan Islam membolehkan semacam perjanjian antara suami isteri, yang masing-masing keduanya mempersyaratkan beberapa poin pernyataan yang digantungkan pelaksanaannya pada waktu yang akan datang. Menurut Umar Sulaiman al-Asyqar, membuat syarat dalam perjanjian pernikahan dibolehkan apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam.² Perlu dicermati bahwa perjanjian dalam pernikahan pada dasarnya berlaku dalam dua kasus dan konteks yang berbeda. *Pertama*, perjanjian pernikahan yang di dalamnya memuat syarat yang ditujukan kepada isteri yang digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Jika ternyata isteri melanggarnya, atau sesuatu yang digantungkan itu terjadi, maka isteri tertalak pada saat itu juga. Dalam konteks ini disebut dengan talak *ta'liq*. *Kedua*, perjanjian pernikahan yang di dalamnya memuat beberapa syarat yang ditujukan dan harus dipenuhi oleh suami kepada isterinya. Jika suami tidak memenuhinya, maka si isteri yang tidak rela dengan itu dapat mengajukannya ke pengadilan sebagai alasan untuk perceraian. Dalam konteks ini disebut dengan *ta'liq talak*.³

Menurut Amir Syarifuddin, antara talak *ta'liq* dan *ta'liq talak* memiliki perbedaan mendasar. Istilah talak *ta'liq* merupakan talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang terjadi kemudian. Misalnya, suami menyatakan, “Bila ayahmu pulang dari luar negeri, engkau saya talak”.⁴ Dalam kalimat lain misalnya suami berkata, “Setiap kali kamu keluar rumah tanpa seizinku, kamu orang yang ditalak”. Pernyataan semacam ini bila dilanggar atau terjadi di kemudian hari, maka talak

¹Lihat, Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Bairut: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1950), hlm. 17: Juga diulas dalam, Amīr Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 39.

²Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj*, (terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Media, 2015), hlm. 206.

³Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 225.

⁴Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan....*, hlm. 225.

dipandang sah dan jatuh satu talak.⁵ Jadi, objek yang dituju dalam kasus talak *ta'liq* adalah pihak isteri. Isterilah yang berperan untuk tidak melanggar pernyataan suami. Sementara dalam kasus *ta'liq* talak, objek yang dituju justru pihak suami. Artinya, jika suami tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat dan isteri tidak rela maka isteri dapat mengajukan cerai ke Pengadilan. Untuk itu, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah *ta'liq* talak, yakni berupa perjanjian yang disetujui suami sesaat setelah akad nikah dilangsungkan.

Pembahasan

Term "*ta'liq* talak" tersusun dari dua kata, yaitu *ta'liq* dan talak. Kata *ta'liq* berasal dari bahasa Arab "تَغْلِيْقٌ", artinya mengisap jari-jarinya, mencaci maki, dan menggantungkan.⁶ Makna etimologis yang sering digunakan adalah menggantungkan atau penggantungkan.⁷ Makna tersebut agaknya digunakan boleh jadi tujuan dari *ta'liq* itu sendiri dalam talak yaitu sebagai suatu sikap menggantungkan atas sesuatu sehingga dengan sesuatu itu akan terjadi talak. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *ta'liq* ialah:

وقوف حدوث حادثة بشيء من الشرط او الزمان او المكان.⁸

Artinya: "Terhentinya kejadian suatu peristiwa dengan suatu syarat, masa, ataupun tempat".

Berdasarkan pengertian di atas, *ta'liq* pada dasarnya merupakan ucapan atau tindakan yang memiliki pengaruh untuk menghentikan sesuatu. Dalam konteks pernikahan, *ta'liq* dapat dimaknai sebagai ungkapan atau tindakan yang berpengaruh pada terhentinya hubungan pernikahan. Dengan makna lain, *ta'liq* merupakan sesuatu yang digantungkan sehingga hubungan pernikahan antara suami-isteri terikat atas apa yang digantungkan.

Kata kedua yaitu "talak", juga asalnya dari bahasa Arab "الطَّلَاق", Ibn Manzūr menyebutkan dari kata "الطَّلُق",⁹ yang berarti memberikan, lepas dari ikatannya berpisah, bercerai, atau jauh.¹⁰ Al-Barkatī dan al-Jurjānī memaknai talak dalam etimologis sebagai pelepasan "إِزَالَةٌ" atau mengabaikan "التَّخْلِيَّةُ".¹¹

Menurut terminologi, terdapat beragam rumusan. Menurut al-Jazīrī, talak adalah istilah meniadakan pernikahan atau pengurangan keterlepasannya dengan

⁵Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 613.

⁶A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 963.

⁷Beberapa literatur menggunakan makna menggantungkan atau penggantungkan untuk kata *ta'liq* misalnya dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Cet. 3, Jilid 2, (Jakarta: al-Mahira, 2017), hlm. 614.

⁸Munajib Kholid, "*Ta'liq*". Diakses melalui: <http://www.al-halimy.com/2016/01/23/t-a-l-i-q/>, pada tanggal 13 Maret 2019.

⁹Ibn Manzūr, *Lisān al'Arb*, Juz 12, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 95.

¹⁰A. W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 861-862.

¹¹Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah: Mu'jam Yasyrah al-Fāz al-Muṣṭalah 'Alaihā baina al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 136: Lihat juga, Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Mesir: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 119.

lafaz khusus. Maksud menghilangkan pernikahan adalah meniadakan akad di mana isteri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu.¹² Dalam makna ini, memberi satu pemahaman makna keterhubungan dengan makna etimologis sebelumnya, yaitu maksud lepas (secara etimologis) yaitu terlepas dari hubungan pernikahan yang sebelumnya terhubung secara kuat (*miṣāqan ghalīzan*), sehingga terputus dengan lafaz talak. Untuk melengkapi rumusan tersebut, di sini penulis merasa perlu untuk mengutip definisi talak menurut fikih mazhab sebagai berikut:

Dalam fikih Hanafi, talak diartikan dengan “إزالة النكاح¹³”, “menghilangkan (membatalkan nikah)”. Mazhab Maliki memberi definisi talak dengan “حل العصمة¹⁴” (melepaskan ikatan akad antara suami isteri). Mazhab Syafi’i memberi definisi talak dengan “حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه¹⁵” (melepaskan akad nikah dengan lafaz talak dan sejenisnya). Sedangkan mazhab Hanbali mengartikan talak dengan “حل قيد النكاح¹⁶” (melepaskan ikatan nikah).

Definisi tersebut di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda namun megandung maksud dan tujuannya sama, yakni sama-sama sebagai bentuk memutuskan tali pernikahan. Dalam pengertian lain, dapat dirumuskan bahwa talak adalah satu bentuk ketentuan hukum berupa pelepasan ikatan pernikahan yang dikehendaki suami terhadap isterinya,¹⁷ dengan menggunakan lafaz tertentu dan memberi maksud pada talak dengan konsekuensi isteri tidak halal lagi untuk bercampur dengan suami.

Dari pemaknaan kata “*ta’līq*” dan “talak” di atas, maka kedua kata tersebut biasanya disebutkan dalam satu frasa tersendiri sebagai *ta’līq talak*, memiliki makna dan hukum tersendiri. Secara definitif, term *ta’līq talak* dalam versi fikih Islam juga memiliki banyak definisi, di antaranya disebutkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa *ta’līq talak* adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan yang pelaksanaannya digantungkan kepada sesuatu yang

¹²Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576-577.

¹³Ibn ‘Ābidīn, *Radd al-Muhtār ‘alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 4, (Riyadh: Dār ‘Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 425: Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Maudūdi, seorang ulama mazhab Hanafi. Lihat, Muḥammad bin Maudūdi, *al-Ikhtiyār li Ta’līl al-Mukhtār*, Juz 3, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, tt), hlm. 121.

¹⁴Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *al-Muqaddimāt al-Mumahhadāt: li Bayān mā Iqtaḍatuh Rusūm al-Mudawwanah min al-Aḥkām al-Syar’iyyāt wa al-Taḥṣīlāt al-Muḥkamāt li Ummahāt Masā’ilahā al-Musykilāt*, Juz 1, (Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988), hlm. 497.

¹⁵Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma’rifah Ma’ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2000), hlm. 455.

¹⁶Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, (Bairut: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1983), hlm. 233: Definisi yang serupa juga dapat dilihat dalam, Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 191-192.

¹⁷Disebutkan kehendak suami karena talak merupakan hak suami. Hak tersebut melekat pada suami bukan pada isteri berdasarkan nas. Hal ini dengan alasan isteri dipandang cepat marah dan irrasional dalam urusan talak. Lihat, Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 91.

terjadi di kemudian hari.¹⁸ Dalam definisi lainnya, juga diketengahkan oleh Tihami. Ia menggunakan term *ta'liq* dengan *mu'allaq*, bahwa talak *mu'allaq* adalah talak yang jatuhnya disandarkan pada suatu masa yang akan datang.¹⁹

Dua rumusan di atas cenderung memiliki perbedaan dari redaksi dan ada kesamaan dari sisi makna dan maksudnya, di mana *ta'liq* talak atau talak *mu'allaq* merupakan ucapan suami atas nama talak dan jatuhnya talak pada saat sesuatu terjadi pada masa yang akan datang. Seperti suami mengatakan: “akan jatuh talak jika kamu pergi ke suatu tempat”, atau dengan redaksi lain: “engkau tertalak besok”.²⁰ Dari pemisalan ini, maka putusnya tali nikah dalam kategori *ta'liq* talak digantungkan pada waktu tertentu atau keadaan tertentu.

Makna dan maksud *ta'liq* talak dalam versi fikih Islam cenderung berbeda dengan makna dan maksud *ta'liq* talak dalam versi hukum positif di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang dimuat dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Makna *ta'liq* talak dalam hukum positif dipahami sebagai suatu perjanjian nikah dengan objek atau pihak yang terikat janji adalah pihak suami. Ahmad Rafiq menyatakan *ta'liq* talak termasuk salah satu macam perjanjian perkawinan.²¹ Nuruddin dan Tarigan juga memberi definisi bahwa *ta'liq* talak (dalam peraturan perundang-undangan) adalah janji atau pernyataan yang biasa dinyatakan suami setelah akad nikah, kala suami melanggar janji dan isteri tidak rela maka isteri berhak menggugat cerai.²²

Mahkamah Syariah adalah mahkamah yang khusus berlaku bagi warga negara Malaysia yang beragama Islam, dan untuk perkara-perkara tertentu saja baik itu *kes sivil* (perkara perdata) maupun *kes jenayah* (perkara pidana). Mahkamah Syariah di Malaysia ini dinamakan juga Mahkamah Kadi. Tidak seperti Peradilan Agama di Indonesia, Mahkamah Syariah di Malaysia masih dipandang sebelah mata oleh pemerintah persekutuan (pusat). Ini adalah sebagai akibat dari sistem pemerintahan federal yang memberikan kekuasaan dan kewenangan lebih besar kepada kerajaan negeri (negara bagian) dalam mengatur negaranya.²³

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa negara Malaysia dibagi ke dalam beberapa negara bagian. Di tiap negara bagian tersebut terdapat beberapa regulasi tersendiri khusus berlaku dalam negara bagian yang dimaksud, baik berupa regulasi hukum pidana maupun perdata, termasuk regulasi tentang hukum keluarga Islam.

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2015), hlm. 225.

¹⁹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 241.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum....*, hlm. 225: Lihat juga, H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih....*, hlm. 241.

²¹ Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 128.

²² Amieur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2014), hlm. 222.

²³ Ahmad Bahiej, *Studi....*, hlm. 340-343.

Penelitian ini dilakukan di Negeri Perak. Di Negeri Perak, aturan hukum keluarga dimuat dalam “Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004”.

Enakmen Keluarga Islam Perak Tahun 2004 merupakan hukum materil yang kedudukannya sama seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia. Enakmen Keluarga Islam Perak tahun 2004 mengatur beberapa masalah hukum keluarga menurut Islam. Secara umum, enakmen tersebut dibagi ke dalam 10 (sepuluh) bagian, masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

BAHAGIAN I – PERMULAAN

- Seksyen 1. Tajuk ringkas dan permulaan kuat kuasa
- Seksyen 2. Tafsiran
- Seksyen 3. Kecualian prerogatif
- Seksyen 4. Pemakaian
- Seksyen 5. Kriteria untuk memutuskan sama ada seseorang itu orang Islam
- Seksyen 6. Perkahwinan yang masih berterusan hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen ini dan boleh dibubarkan hanya di bawah Enakmen ini

BAHAGIAN II – PERKAHWINAN

- Seksyen 7. Orang yang boleh mengakadnikahkan perkahwinan
- Seksyen 8. Umur minimum untuk perkahwinan
- Seksyen 9. Pertalian yang dilarang perkahwinan
- Seksyen 10. Orang daripada agama lain
- Seksyen 11. Perkahwinan tak sah
- Seksyen 12. Perkahwinan yang tidak boleh didaftarkan
- Seksyen 13. Persetujuan dikehendaki
- Seksyen 14. Perkahwinan seseorang perempuan
- Seksyen 15. Pertunangan
- Seksyen 16. Permohonan untuk kebenaran berkahwin
- Seksyen 17. Mengeluarkan kebenaran berkahwin
- Seksyen 18. Rujukan kepada dan tindakan oleh Hakim rie
- Seksyen 19. Kebenaran perlu sebelum akad nikah
- Seksyen 20. Tempat perkahwinan
- Seksyen 21. Mas kahwin dan pemberian
- Seksyen 22. Catatan dalam Daftar Perkahwinan
- Seksyen 23. Poligami
- Seksyen 24. Akad nikah perkahwinan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., Malaysia di luar negeri

BAHAGIAN III - PENDAFTARAN PERKAHWINAN

- Seksyen 25. Pendaftaran
- Seksyen 26. Perakuan nikah
- Seksyen 27. Melaporkan perkahwinan yang tak sah atau salah di sisi undang-undang

- Seksyen 28. Pelantikan Ketua Pendaftar, Pendaftar, Timbalan dan Penolong Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju' Orang Islam
- Seksyen 29. Buku dan Daftar hendaklah disimpan mengenai semua perkawinan
- Seksyen 30. Salinan catatan hendaklah dihantar kepada Ketua Pendaftar
- Seksyen 31. Pendaftaran perkahwinan luar negeri oleh orang yang bermastautin dalam Negeri Perak Darul Ridzuan
- Seksyen 32. Daftar yang tidak sah di sisi undang-undang
- Seksyen 33. Pendaftaran sukarela perkawinan-perkahwinan orang Islam yang diakadnikahkan dahulunya di bawah mana-mana undang-undang
- Seksyen 34. Kesan pendaftaran di sisi undang-undang

BAHAGIAN IV - PENALTI DAN PERUNTUKAN PELBAGAI BERHU-BUNG DENGAN AKAD NIKAH DAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN

- Seksyen 35. Tidak hadir di hadapan Pendaftar dalam masa yang ditetapkan
- Seksyen 36. Pelanggaran seksyen 32
- Seksyen 37. Gangguan terhadap perkahwinan
- Seksyen 38. Akuan atau pernyataan palsu untuk mendapatkan perkahwinan
- Seksyen 39. Mengakadnikahkan tanpa kuasa
- Seksyen 40. Kesalahan berhubung dengan akad nikah perkahwinan
- Seksyen 41. Kebenaran untuk mendakwa
- Seksyen 42. Membetulkan kesilapan
- Seksyen 43. Pemeriksaan Daftar Perkahwinan dan indeks perkahwinan
- Seksyen 44. Bukti

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

- Seksyen 45. Takat kuasa untuk membuat perintah
- Seksyen 46. Pertukaran agama
- Seksyen 47. Perceraian dengan talaq atau dengan perintah
- Seksyen 48. Timbang tara oleh Hakam
- Seksyen 49. Perceraian khul' atau cerai tebus talaq
- Seksyen 50. Perceraian di bawah ta'liq atau janji
- Seksyen 51. Perceraian dengan li'an
- Seksyen 52. Hidup semula sebagai suami isteri atau ruju'
- Seksyen 53. Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh
- Seksyen 54. Anggapan mati
- Seksyen 55. Penyenggaraan Daftar Perceraian dan Pembatalan
- Seksyen 56. Pendaftaran perceraian
- Seksyen 57. Pendaftaran perceraian di luar Mahkamah

- Seksyen 58. Mut'ah atau pemberian sugu hati kepada perempuan yang dicerai tanpa sebab yang patut
Seksyen 59. Hak terhadap mas kahwin, dsb., tidak akan tersentuh

BAHAGIAN VI - NAFKAH ISTERI, ANAK DAN LAIN-LAIN

- Seksyen 60. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi isteri, dan kesan nusyuz
Seksyen 61. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi seseorang tertentu
Seksyen 62. Pentaksiran nafkah
Seksyen 63. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran bagi nafkah
Seksyen 64. Mengkompaun nafkah
Seksyen 65. Lamanya tempoh perintah nafkah
Seksyen 66. Hak terhadap nafkah atau pemberian selepas perceraian
Seksyen 67. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah nafkah
Seksyen 68. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian nafkah
Seksyen 69. Nafkah yang kena dibayar di bawah perintah Mahkamah tidak boleh dipindahkan hakmiliknya
Seksyen 70. Menuntut tunggakan nafkah
Seksyen 71. Nafkah sementara
Seksyen 72. Hak tempat tinggal
Seksyen 73. Kewajipan menanggung nafkah anak
Seksyen 74. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan nafkah bagi kanak-kanak
Seksyen 75. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan cagaran bagi nafkah seseorang anak
Seksyen 76. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perintah mengenai penjagaan atau nafkah seseorang anak
Seksyen 77. Kuasa Mahkamah untuk mengubah perjanjian penjagaan atau nafkah seseorang anak
Seksyen 78. Menuntut tunggakan nafkah seseorang anak
Seksyen 79. Kewajipan menanggung nafkah kanak-kanak yang diterima sebagai anggota keluarga
Seksyen 80. Lamanya tempoh perintah bagi nafkah anak
Seksyen 81. Kewajipan menanggung nafkah anak-anak tak sah taraf

BAHAGIAN VII – PENJAGAAN

- Seksyen 82. Orang yang berhak menjaga kanak-kanak
Seksyen 83. Kelayakan yang perlu untuk penjagaan
Seksyen 84. Bagaimana hak penjagaan hilang
Seksyen 85. Lamanya penjagaan
Seksyen 86. Penjagaan anak-anak tak sah taraf
Seksyen 87. Kuasa Mahkamah untuk membuat perintah mengenai penjagaan

- Seksyen 88. Perintah tertakluk kepada syarat-syarat
- Seksyen 89. Orang yang berhak kepada penjagaan
- Seksyen 90. Kuasa ke atas harta tak alih dan harta alih
- Seksyen 91. Pelantikan penjaga oleh Mahkamah
- Seksyen 92. Pelantikan ibu sebagai penjaga melalui wasiat
- Seksyen 93. Penjaga bersama dengan ibu
- Seksyen 94. Perubahan kuasa penjaga harta
- Seksyen 95. Pemecatan penjaga
- Seksyen 96. Cagaran hendaklah diberi
- Seksyen 97. Had kuasa bagi penjaga yang dilantik oleh Mahkamah
- Seksyen 98. Penjaga tidak boleh memberi akuan penyelesaian mengenai harta modal
- Seksyen 99. Penjaga boleh menanggung kanak-kanak daripada pendapatan
- Seksyen 100. Perintah khas mengenai harta kecil
- Seksyen 101. Permohonan untuk mendapatkan pendapat, dsb.
- Seksyen 102. Perintah larangan oleh Mahkamah
- Seksyen 103. Penjaga bagi anak yatim
- Seksyen 104. Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang nasihat pegawai-pegawai kebajikan, dll.
- Seksyen 105. Kuasa Mahkamah untuk menghalang anak dibawa keluar dari Malaysia
- Seksyen 106. Kuasa Mahkamah untuk membatalkan dan menahan perpindahan yang dimaksudkan untuk mengecewakan tuntutan nafkah
- Seksyen 107. Perintah tegahan
- Seksyen 108. Perintah larangan melupuskan harta sepencarian

BAHAGIAN VIII – PELBAGAI

- Seksyen 109. Pengiktirafan perkahwinan orang Islam yang dilakukan di luar Negeri Perak Darul Ridzuan
- Seksyen 110. Pengiktirafan perkahwinan yang dilakukan di Kedutaan-Kedutaan, dsb., di Negeri Perak Darul Ridzuan
- Seksyen 111. Siapakah yang dikaitkan sebagai bapa
- Seksyen 112. Kelahiran lebih daripada empat tahun selepas pembubaran perkahwinan
- Seksyen 113. Kelahiran selepas pengakuan bahawa 'iddah telah tamat
- Seksyen 114. Persetubuhan syubhah
- Seksyen 115. Syarat-syarat bagi pengakuan yang sah
- Seksyen 116. Anggapan daripada pengakuan boleh dipatahkan
- Seksyen 117. Pengakuan oleh perempuan yang sedang dalam 'iddah
- Seksyen 118. Mengakui seorang lain sebagai ibu atau bapa
- Seksyen 119. Pengakuan selain sebagai anak, ibu atau bapa
- Seksyen 120. Pengakuan tidak boleh dibatalkan
- Seksyen 121. Permohonan oleh isteri yang ditinggal langsung

- Seksyen 122. Kuasa Mahkamah untuk memerintahkan pembahagian harta sepencarian
Seksyen 123. Rayuan

BAHAGIAN IX – PENALTI

- Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah
Seksyen 125. Perceraian di luar Mahkamah dan tanpa kebenaran Mahkamah
Seksyen 126. Tidak membuat laporan
Seksyen 127. Meninggalkan langsung isteri
Seksyen 128. Menganiaya isteri atau suami
Seksyen 129. Tidak memberi keadilan yang sewajarnya kepada isteri
Seksyen 130. Isteri tidak menurut perintah
Seksyen 131. Percubaan menjadi murtad untuk membatalkan perkahwinan
Seksyen 132. Persetubuhan luar nikah antara orang yang bercerai
Seksyen 133. Kecuaian dengan sengaja untuk mematuhi perintah
Seksyen 134. Percubaan dan subahat

BAHAGIAN X – AM

- Seksyen 135. Kuasa bagi membuat kaedah-kaedah
Seksyen 136. Pemansuhan

Berdasarkan uraian di atas, tampak jelas bahwa undang-undang atau Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak tahun 2004 memuat beberapa materi hukum yang urgen dalam bidang hukum perkawinan, mulai dari pemberitahuan kehendak nikah, pendaftaran, ketentuan masing-masing calon, poligami, hingga tata cara perceraian menurut Islam. Enakmen tersebut cenderung sama seperti ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sebab KHI sendiri berlaku hanya bagi dan untuk orang-orang Islam, begitu pula Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak juga berlaku hanya bagi dan untuk orang-orang Islam saja.

Salah satu regulasi yang diatur dalam enakmen tersebut yaitu persoalan *ta'liq talak*. Hal ini dijumpai dalam Seksyen 22 dan Seksyen 50. Terkait dengan praktik *ta'liq talak* yang dilakukan di Negeri Perak, berikut dengan akibat hukum, serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut akan dikemukakan dalam sub bahasan berikut.

Praktik *ta'liq talak* dalam masyarakat Negeri Perak juga tidak jauh berbeda sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Makna *ta'liq talak* dalam Enakmen tersebut dinyatakan dalam Bagian I-Permulaan, tepatnya pada Seksyen 2, bahwa "*ta'liq talak* adalah lafaz perjanjian yang dibuat oleh suami sesudah akad nikah berdasarkan Hukum Syarak dan ketentuan Enakmen ini".²⁴

²⁴Government of Perak, *Islamic Family Law (Perak) Enactment 2004*, (Negeri Perak: Warta Kerajaan, 2004), hlm. 406.

Atas rumusan tersebut, dapat diketahui *ta'liq* talak dilakukan sesaat akad nikah dilangsungkan, berupa perjanjian yang diucapkan suami kepada isteri dalam beberapa butir perjanjian yang telah ditentukan oleh Mahkamah Syariah, dan butir perjanjian dalam *ta'liq* cenderung berbeda dari beberapa negeri yang ada di Malaysia. Demikian juga dalam kaitan dengan wajib tidaknya pelaksanaan *ta'liq* talak berbeda antara satu negeri dan negeri lain. Di antara negeri yang tidak mewajibkan *ta'liq* talak yaitu Negeri Perlis.²⁵ Khusus di Negeri Perak, perjanjian *ta'liq* talak diwajibkan untuk dibacakan sesaat setelah pernikahan dilakukan. Hal ini dipahami dari ketentuan Seksyen 22-1 Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak, yang berbunyi:

“Setelah akad nikah dilakukan, pendaftar hendaknya mencatatkan butir-butir yang ditetapkan dan *ta'liq* yang ditetapkan atau *ta'liq* lain pada perkawinan itu dalam catatan perkawinan”.²⁶

Di samping itu, kewajiban untuk membacakan perjanjian *ta'liq* talak dipertegas pula oleh beberapa keterangan ahli, seperti Zakariya bin Abdul Razzak, selaku Ketua Penolong Pengarah Bagian Pembangunan Keluarga pada Kantor Jabatan Agama Islam Perak. Ia menyebutkan lebih kurang sebagai berikut:

“Hukum perkawinan secara Islam di Malaysia ditentukan berdasarkan enakmen-enakmen tersendiri. Di Negeri Perak, ketentuan mengatur hukum keluarga Islam disebutkan secara tegas dalam Enakmen tahun 2004. Salah satu ketentuannya kewajiban bagi pasangan suami-isteri untuk melakukan perjanjian. Di mana isi berupa butir-butir agar hak-hak perempuan dipenuhi dari suami, jika tidak maka isteri dibolehkan mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syariah. Ketentuan *ta'liq* talak ini wajib dibacakan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan”.²⁷

Keterangan terbaru penulis peroleh dari wawancara dengan Munajib bin Abdul Isa dan Maimun bin Dahlan, selaku masyarakat di Negeri Perak menyebutkan bahwa semua pasangan yang melangsungkan pernikahan di Negeri Perak diharuskan (wajib) membacakan *ta'liq* talak, berupa perjanjian yang dibacakan oleh pihak suami dengan ketentuan agar semua butir yang tertuang dalam akta *ta'liq* wajib untuk dipenuhi. Jika salah satu butir *ta'liq* talak tersebut tidak dilaksanakan, atau boleh juga dikatakan disepelekan oleh pihak suami, maka konsekuensinya adalah pihak isteri yang tidak terima dapat mengajukan cerai kepada lembaga yang berwenang.²⁸

²⁵Bandingkan sighat *ta'liq* talak di Negeri Perak (dicantumkan dalam lampiran skripsi ini) dengan sighat *ta'liq* talak di Negeri Selangor, lihat dalam Siti Zalikhan MD. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh: Siri Undang-Undang dan Masyarakat*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm. 32: Lihat juga, Najibah Mohd. Zin, dkk, *Undang-Undang Keluarga Islam: Seri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 121.

²⁶Government of Perak, *Islamic...*, hlm. 406.

²⁷Wawancara dengan Zakariya bin Abdul Razzak, Ketua Penolong Pengarah Bagian Pembangunan Keluarga pada Kantor Jabatan Agama Islam Perak, tanggal 7 Desember 2017.

²⁸Wawancara dengan Munajib bin Abdul Isa dan Maimun bin Dahlan, masyarakat Negeri Perak, tanggal 26 Februari 2019.

Perjanjian *ta'liq* talak tidak dapat dilepaskan dari adanya konsekuensi dan akibat hukum yang melekat di dalamnya. Bagi pihak suami, sighthat *ta'liq* yang telah ia bacakan wajib dipenuhi dan dijalankan. Kewajiban membacakan *ṣiḡhah ta'liq* di Negeri Perak pada dasarnya sebagai penguat ketentuan dalam Islam tentang kewajiban suami untuk menunaikan hak nafkah isteri. Hal ini dilakukan karena sewaktu-waktu dapat saja dilanggar suami. Pelanggaran atas *ta'liq* talak di Perak memberi peluang bagi isteri untuk menggugat cerai suami. Gugat cerai karena pelanggaran *ta'liq* talak oleh suami adalah bagian yang relevan dengan ketentuan Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak tahun 2004, tepatnya pada Seksyen 50 sebagai berikut:

“ (1) Seorang perempuan yang bersuami boleh dan berhak mengajukan perceraian menurut syarat-syarat yang telah diakui dalam *ta'liq* yang dibuat setelah akad pernikahan, memohon kepada Mahkamah untuk menetapkan bahwa perceraian yang demikian telah berlaku. (2) Mahkamah hendaklah memeriksa permohonan itu dan membuat suatu ketentuan mengenai sahnya perceraian itu, dan jika telah terbukti bahwa perceraian itu adalah sah mengikut hukum syarak, hendaklah mengesahkan dan menetapkan perceraian itu dan mengantar satu salinan ketetapan itu yang diakui oleh Pendaftar yang bersangkutan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan”.

Muatan materi di atas secara tegas menyebutkan peluang besar bagi isteri, apabila ia ingin bercerai lantaran pengabaian dan pelanggaran janji *ta'liq* yang dibacakan suami sewaktu menikah, maka ia dapat menggunakan dan diberi hak untuk menggugat cerai suaminya. Sejauh penelitian dilakukan terdapat beberapa kasus cerai yang menggunakan legalitas Seksyen 50 sebelumnya, masing-masing dapat disajikan dalam tiga kasus berikut:

- a. Kasus gugat cerai karena pelanggaran Seksyen 50 tentang *ta'liq*, diajukan oleh Zuraidah binti Yeob terhadap suaminya Rusdi bin Abdul Wahab. Jenis perceraian yaitu talak satu *khul'ī*,²⁹ *bā'in ṣuḡhrā*. Alasannya yaitu suami telah membiasakan isteri selama 8 (delapan) bulan dan tidak memberikan nafkah. Dalam kasus ini, Mahkamah Syariah Negeri Perak mengabulkan gugatan cerai dengan tebusan RM 1.00.
- b. Kasus cerai gugat karena pelanggaran Seksyen 50 tentang *ta'liq* juga sebab ingin fasakh suami karena alasan pelanggaran Seksyen 53-1 huruf

²⁹Istilah *khul'ī* atau populer digunakan *khulu'* “الْخُلْعُ”, merupakan jenis perceraian yang berasal dari keinginan isteri. Secara defintif, cerai *khulu'* adalah bentuk perceraian dengan ganti rugi baik dengan lafaz talak atau *khulu'*. Dalam mazhab fi'i, *khulu'* adalah pemisahan di antara pasangan suami isteri dengan *iwaḡ* (ganti rugi) dengan lafaz talak atau *khulu'*. Lihat, Wahbah al-Zuḡhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 481: Dalam makna lain, al-Rāfi'ī menyebutkan *khulu'* boleh diucapkan dengan lafaz talak maupun lafaz *khulu'*. Lihat juga, Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḡharrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, (Mesir: Dār al-Salām, 2013), hlm. 1043: Contoh lafaz perceraian dengan *khulu'* yaitu: “خالعتك” atau “طلقتك”. Lihat, Muḡmmad al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh al-Mazḡhab al-Imām al-Syāfi'ī*, (Bairut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 2004), hlm. 310.

- b Enakmen Negeri Perak tentang pelanggaran nafkah. Cerai gugat tersebut diajukan oleh Marhamah binti Zaidun terhadap suaminya Zubai bin Mahmud Ali. Jenis perceraian adalah fasakh atau pembubaran nikah dengan talak satu *bā'in ṣughrā*. Dalam kasus ini, Mahkamah Syariah Negeri Perak mengabulkan gugatan cerai dengan fasakh.
- c. Kasus cerai gugat karena pelanggaran Seksyen 50 tentang *ta'liq* juga karena pelanggaran Seksyen 53-1 huruf b, diajukan oleh Maimunah binti Ali Hasan terhadap suaminya Amran bin Yakub. Jenis perceraian adalah fasakh nikah dengan ketentuan talak satu *bā'in ṣughrā*. Dalam kasus ini, Majelis Hakim Mahkamah Syariah Negeri Perak juga mengabulkan gugatan tersebut dengan kriteria fasakh nikah.

Tiga kasus tersebut memberi pemahaman bahwa akibat pelanggaran perjanjian *ta'liq* dapat menggugurkan hubungan pernikahan. Dalam hal ini isteri dibenarkan secara hukum menggunakan hak untuk menggugat cerai suami. Dari tiga kasus tersebut, juga dipahami bahwa perceraian karena pelanggaran *ta'liq* bisa dalam bentuk talak tebus atau *khulu'*. Secara definitif, *khulu'* ialah memutuskan hubungan pernikahan dengan pemberian harta dari isteri kepada suaminya.³⁰ Talak jenis ini dipahami pada kasus poin a sebelumnya. Sementara pada kasus poin b dan c, gugat cerai karena pelanggaran *ta'liq* diputuskan dengan fasakh. Gugatan isteri pada dua kasus terakhir mengajukan cerai di samping menggunakan Seksyen 50, penggugat juga menggunakan Seksyen 53. Secara rinci muatan Seksyen 53 tersebut sebagai berikut:

Seksyen 53: Perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh

- (1) Seseorang perempuan atau lelaki, mengikut mana-mana yang berkenaan, yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk *fasakh* atas satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, yaitu:
- (1) Bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada satu tahun;
 - (2) Bahawa suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkahnya selama tempoh tiga bulan;
 - (3) Bahawa suami atau isteri telah dihukum dengan hukuman pemenjaraan selama tempoh tiga tahun atau lebih;
 - (4) Bahawa suami atau isteri telah tidak menunaikan, tanpa sebab yang munasabah menurut Hukum Syarak, kewajipan perkahwinannya (nafkah batin) selama tempoh satu tahun;
 - (5) Bahawa suami telah mati pucuk pada masa perkahwinan dan masih lagi sedemikian dan isteri tidak tahu pada masa perkahwinan bahawa suami telah mati pucuk;

³⁰Muhammad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*, Juz 5, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), hlm. 309.

- (6) Bahawa suami atau isteri telah gila selama tempoh dua tahun atau sedang mengidap penyakit kusta atau vitiligo atau sedang mengidap penyakit kelamin dalam keadaan boleh berjangkit;
 - (7) Bahawa isteri, setelah dikahwinkan oleh wali *mujbir*-nya sebelum dia mencapai umur *bāligh*, menolak perkahwinan itu sebelum mencapai umur delapan belas tahun, dan dia belum disetubuhi oleh suaminya itu;
 - (8) Bahawa suami atau isteri menganiayai isteri atau suaminya yaitu, antara lain:
 - 1) Lazim menyakiti atau menjadikan kehidupannya menderita disebabkan oleh kelakuan aniaya;
 - 2) Berkawan dengan perempuan atau lelaki yang berperangai jahat atau hidup berperangai keji mengikut pandangan Hukum rak;
 - 3) Cuba memaksa isteri hidup secara lucah;
 - 4) Melupuskan harta isteri atau suami atau melarang isteri atau suami itu daripada menggunakan haknya di sisi undang-undang terhadap harta itu;
 - 5) Menghalang isteri atau suami daripada menunaikan atau menjalankan kewajiban atau amalan agamanya; atau
 - 6) Jika suami mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikut kehendak-kehendak Hukum Syarak;
 - (a) Bahawa walaupun empat bulan berlalu tetapi perkahwinan itu belum disatukan kerana suami atau isteri bersengaja enggan disetubuhi;
 - (b) Bahawa isteri tidak izin akan perkahwinan itu atau izinnya tidak sah, sama ada oleh sebab paksaan, kesilapan, ketidaksempurnaan akal, atau hal keadaan lain yang diiktiraf oleh Hukum Syarak;
 - (c) Bahawa pada masa perkahwinan itu isteri, sungguhpun berkebolehan memberi izin yang sah, adalah seorang yang sakit mental, sama ada berterusan atau berselangan, dalam erti Ordinan Sakit Mental, atau sakit mentalnya adalah daripada suatu jenis atau setakat yang menjadikannya tidak layak untuk berkahwin; atau
 - (d) Apa-apa alasan lain yang diiktiraf sebagai sah bagi membubarkan perkahwinan atau bagi fasakh di bawah Hukum Syarak.
- (2) Mana-mana orang yang berkahwin mengikut Hukum Syarak adalah berhak mendapatkan perintah bagi pembubaran perkahwinan atau

- fasakh* atas alasan bahawa isteri menjadi tak upaya yang menghalang persetubuhan”.
- (3) Tiada suatu perintah boleh dibuat atas alasan dalam perenggan (1) (c) sehingga hukuman pemenjaraan itu telah menjadi muktamad dan suami atau isteri itu telahpun menjalani satu tahun daripada hukuman itu”.
 - (4) Sebelum membuat suatu perintah atas alasan dalam perenggan (1) (e) Mahkamah hendaklah, atas permohonan suami, membuat suatu perintah menghendaki suami memuaskan hati Mahkamah dalam tempoh satu tahun dari perintah itu bahawa dia tidak lagi mati pucuk, dan jika suami memuaskan hati Mahkamah sedemikian dalam tempoh itu, tiada suatu perintah *fasakh* boleh dibuat atas alasan itu”.
 - (5) Tiada suatu perintah boleh dibuat atas mana-mana alasan dalam subseksyen (1) jika suami memuaskan hati Mahkamah bahawa bahawa isteri, dengan mengetahui bahawa adalah terbuka kepadanya untuk mendapatkan perkahwinan itu ditolak, telah bertingkah laku terhadap suaminya dengan cara yang menyebabkan suami mempercayai dengan munasabah bahawa isteri tidak akan bertindak untuk menolak perkahwinan itu, dan bahawa adalah tidak adil kepada suami jika dibuat perintah itu”.

Seksyen 53-1 huruf b di atas tegas menyebutkan pihak perempuan juga memiliki hak untuk membubarkan pernikahan melalui jalan *fasakh*, yaitu pembatalan nikah melalui jalan peradilan.³¹ Salah satu alasannya bahwa suami telah mengabaikan hak nafkah isteri selama tiga bulan. Apabila dicermati, ketentuan Seksyen 53-1 huruf b pada dasarnya cukup menjadi dasar bagi pihak isteri mengajukan cerai gugat tanpa harus merujuk pada pelanggaran *ta'liq* sebagaimana ketentuan Seksyen 50. Namun demikian, keberadaan *ta'liq* pada seksyen tersebut tentu lebih memperkuat bagi isteri dalam menjamin hak-haknya selaku isteri atas nafkah yang telah dilanggar suami.

Terhadap tiga kasus di atas, dapat diketahui bahwa akibat hukum pelanggaran perjanjian *ta'liq* yaitu terbukanya peluang cerai yang diajukan oleh isteri kepada suami. Bahkan, melalui perjanjian *ta'liq* tersebut suami tidak bisa lagi semena-mena mengabaikan hak nafkah isteri. Pengabaian hak nafkah tersebut justru berakibat pada isteri dapat menggunakan hak untuk menceraikan suamiya.

Perceraian melalui jalan *ta'liq* talak dalam hukum Islam (atau lebih tepatnya dalam fikih Islam)³² berbeda dengan ketentuan dalam hukum positif Indonesia juga

³¹Menurut Ibn al-Subkī, dikutip oleh al-Suyūfī, makna *fasakh* “فسخ” dalam makna umum adalah “حل ارتباط العقد”, artinya memisahkan hubungan akad. Al-Suyūfī mengutip pendapat Ibn al-Subkī tersebut saat ia menjelaskan tentang hukum *fasakh* dalam jual beli. Lihat, Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *al-Asybah wa al-Nazā'r fi Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 2, (Riyadh: Maktabah Nuzūl Muṣṭafā al-Bāz, 1997), hlm. 34: Dalam hubungan dengan *fasakh* nikah, terdapat banyak rumusan. Di antaranya yaitu: “زوال رابطة العقد بين الزوجين بحكم القاضي”, artinya, memutuskan hubungan akad nikah di antara suami isteri melalui hukum pengadilan. Lihat, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh....*, Juz 7, hlm. 494.

³²Perkembangan pemaknaan istilah hukum Islam “حکم الإسلام” menurut sebagian ahli merupakan satu istilah yang mandiri dan khas di Indonesia, di mana term “hukum Islam” disinyalir

di Malaysia, sebab pihak yang menjadi jaminan pemenuhan janji dibebankan kepada suami, artinya jika suami melanggar janji *ta'liq* maka isteri diberi hak untuk menggugat cerai. Hal ini tentu berbeda dengan pendapat para ulama yang dibahas dalam kitab-kitab fikih tradisional-klasik. *Ta'liq* talak yang dipahami dalam pendapat fuqaha justru pihak isterilah yang terikat janji *ta'liq*. Apabila ia melanggar terhadap syarat yang telah ditetapkan suami dalam *ta'liq*-nya, maka talak dipandang jatuh. Uraian tentang perbedaan konstruksi hukum ini telah penulis singgung pada bab dua penelitian ini.

Penormaan hukum *ta'liq* talak yang dimuat dalam Enakmen Hukum Keluarga Islam Perak tahun 2004 jelas tidak mengadopsi pendapat para ulama. Hal menarik dalam kajian ini adalah bagaimana pandangan Islam terhadap praktik *ta'liq* talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak. Hukum *ta'liq* talak di tiap-tiap negara khususnya di Negeri Perak Malaysia memberi angin segar bagi perempuan. Perempuan adalah sosok yang sering mendapat perlakuan yang diskriminatif dari pasangannya (suami). Isteri sering mendapat perlakuan kasar baik secara psikis maupun fisik. Agaknya, perjanjian *ta'liq* talak dalam enakmen tersebut mempersempit ruang gerak bagi suami agar tidak berbuat semena-mena terhadap isteri. Suami dituntut untuk selalu memenuhi apa yang diperjanjikan dalam sighat *ta'liq* yang telah ia bacakan.

Kewajiban membacakan *ta'liq* talak oleh suami sebagaimana di Negeri Perak tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan boleh jadi sebaliknya yaitu sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam itu sendiri. Salah satu dasar keberlakuan *ta'liq* talak tersebut mengacu pada kemaslahatan atau sering disebut dengan *maṣlahah*.³³ Ketetapan janji *ta'liq* adalah bagian dari usaha pemerintah Negeri Perak dalam mengatur masyarakat agar menjadi lebih baik dan maslahat. Hal ini

sebagai terjemahan dari “ألفقه الإسلامى” dan jarang sekali digunakan dalam literatur tradisional. Hal ini telah disinggung oleh Abdul Manan dan Abd Shomad. Lihat, Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 38; Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23; Istilah hukum juga sering disandingkan dengan syariah, al-Qaraḍāwī menyebutkan Syariah sebagai peraturan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Al-Dawoody mendefinisikan riat sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw. Abubakar mendefinisikan riat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan. Masing-masing dapat dilihat dalam, Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13; Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109; Lihat juga, Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19.

³³Istilah *maṣlahah* “المصلحة” secara bahasa berarti baik, bermanfaat. Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, salah satunya menurut al-Ghazālī. Menurutnyanya “المصلحة” adalah menarik manfaat dan menolak kemudaratan: “أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة”, artinya: “adapun *maṣlahah* adalah satu ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat”. Lihat, Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Mesir: Sidrah al-Muntahā, tt), hlm. 328.

sesuai dengan salah satu kaidah yang menyebutkan bahwa pemerintah dalam membuat satu aturan hukum adalah demi kemaslahatan masyarakatnya:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة.³⁴

Artinya: “Ketetapan seorang imam terhadap rakyat adalah di atas pertimbangan kemaslahatan”.

Kaitan dengan ketentuan *ta'liq* talak di Negeri Perak, bahwa ketentuan tersebut bagian dari usaha pemerintah dalam mengatur masyarakat atau rakyatnya yang perempuan yang berada di bawah wilayah hukum Negeri Perak agar mendapat perlakuan baik dari suami, terpenuhinya hak-hak isteri atas dasar janji suami yang wajib diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan. Apabila suami melanggar janji, maka dengan pengaturan perceraian atas pelanggaran *ta'liq* secara sendirinya akan mengurangi beban mudarat yang dialami oleh perempuan dari pengabaian suami atas kewajibannya.

Jika dilihat dalam konstruksi hukum Islam, bahwa segala sesuatu yang ditetapkan memiliki tujuan tersendiri dan tujuan umum hukum Islam itu sendiri, yaitu untuk menciptakan kebaikan dan kemaslahatan bagi umat manusia.³⁵ Oleh sebab itu, tujuan kemaslahatan tersebut juga sedapat mungkin digunakan oleh pemerintah dalam mengatur segala persoalan masyarakat, termasuk aturan dilegalkannya isteri untuk menggugat cerai suami dengan alasan bahwa suami telah melanggar sighat *ta'liq* yang diucapkannya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka tiba dalam satu pemahaman dan kesimpulan bahwa sejauh amatan penulis, praktik *ta'liq* talak di Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh Perak tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan untuk memperkuat status kewajiban suami untuk memenuhi hak isteri jangan sampai terabaikan. Jika dalam beberapa kasus ditemukan adanya cerai gugat isteri lantaran suami melanggar sighat *ta'liq*, maka hal ini juga dipandang wajar dan tidak bertentangan dengan nilai hukum Islam. Sebab isteri juga punya hak yang sama untuk tetap merajut hubungan nikah atau bahkan melepaskannya melalui jalan perceraian.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan, yaitu:

1. Praktik *ta'liq* talak yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Perak dilakukan sesaat setelah akad nikah dilangsungkan, disaksikan oleh dua orang saksi, penghulu, dan wali dari pihak perempuan. Pembacaan sighat

³⁴Jalāl al-Dīn al-Suyūfī, *al-Asybah...*, Juz 1, hlm. 202.

³⁵Menurut Ibn Taimiyah, tujuan datangnya hukum dalam Islam adalah menghilangkan kerusakan atau meminimalisasi kerusakan tersebut. Apabila tidak memungkinkan untuk menghilangkannya maka paling tidak dapat meminimalisasinya. Lihat, Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, (Syarḥ: Muḥammad bin Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn), (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004), hlm. 151: Al-Syātibī dalam “*al-Muwāfaqāt*” juga menyebutkan bahwa ditetapkannya riat adalah untuk kemaslahatan para hamba. Lihat, Abī Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-rī'ah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 220.

- ta'liq* talak ini wajib dilakukan untuk tiap-tiap pasangan yang menikah di dalam wilayah hukum Negeri Perak, yang isinya suami berjanji untuk memenuhi hak-hak isteri.
2. Akibat hukum pelanggaran *ta'liq* talak di Negeri Perak berpengaruh terhadap kelangsungan hubungan pernikahan. Isteri yang tidak ridha dengan pelanggaran tersebut dapat menggunakan haknya untuk mengajukan cerai gugat suami kepada Mahkamah Syariah sebagaimana legalisasinya diakui dalam Seksyen 50-1 Enakmen Hukum Keluarga Islam Negeri Perak tahun 2004.
 3. Sejauh analisis pembahasan, praktik *ta'liq* talak ditetapkan di Mahkamah Tinggi Syariah Perak telah sesuai dengan norma hukum Islam. Praktif *ta'liq* talak tersebut bagian dari usaha untuk melindungi hak-hak perempuan yang *notabene* rentan menjadi pihak tersubordinat. Keberadaan *ta'liq* talak sesuai dengan konsep *maṣlahah*.

Daftar Pustaka

- A.W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Abd al-Karīm al-Rāfi'ī, *al-Muḥarrar fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'ī*, Mesir: Dār al-Salām, 2013.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī Ishāq al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-rī'ah*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2015.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU. No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Mdia Group, 2014
- Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2017.
- Government of Perak, *Islamic Family Law (Perak) Enactment 2004*, Negeri Perak: Warta Kerajaan, 2004.

- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār 'alā al-Darr al-Mukhtār Syarḥ Tanwīr al-Abṣār*, Juz 4, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Manzūr, *Lisān al'Arb*, Juz 12, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz 8, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983.
- Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *al-Muqaddimāt al-Mumahhadāt: li Bayān mā Iqṭadatuḥ Rusūm al-Mudawwanah min al-Aḥkām al-Syar'iyyāt wa al-Taḥṣīlāt al-Muḥkamāt li Ummahāt Masā'ilahā al-Musykilāt*, Juz 1, Bairut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988.
- Ibn Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Syarḥ: Muḥammad bin Šāliḥ al-'Usaimīn, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 2004.
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'r fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, Juz 2, Riyadh: Maktabah Nuzūl Muṣṭafā al-Bāz, 1997.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj ilā Ma'rifah Ma'ānī al-Fāz al-Minhāj*, Juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah: Mu'jam Yasyrah al-Fāz al-Muṣṭalah 'Alaihā baina al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003
- Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Bairut: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1950.
- Muḥammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Mesir: Sidrah al-Muntahā, tt.
- Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, Mesir: Dār al-Faḍīlah, 2004.
- Muḥammad bin Maudūdi, *al-Ikhtiyār li Ta'līl al-Mukhtār*, Juz 3, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, tt.
- Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wajīz fī Fiqh al-Māzhab al-Imām al-Syāfi'ī*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Muḥammad al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Māzhab*, Juz 5, Mesir: Dār al-Salām, 1997.
- Najibah Mohd. Zin, dkk, *Undang-Undang Keluarga Islam: Seri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Siti Zalikhan MD. Nor, *Jika Sudah Habis Jodoh: Siri Undang-Undang dan Masyarakat*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005.
- ¹Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj*, terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Media, 2015.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 7, Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Cet. 3, Jilid 2, Jakarta: al-Mahira, 2017.
- Wahbah Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.

Edi Darmawijaya & Nurul Mahfuzah, *Praktik Ta'liq Talak di Negeri Perak Ditinjau Menurut.....*

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

Wawancara

Wawancara dengan Zakariya bin Abdul Razzak, Ketua Penolong Pengarah Bagian Pembangunan Keluarga pada Kantor Jabatan Agama Islam Perak, tanggal 7 Desember 2017.

Wawancara dengan Munajib bin Abdul Isa dan Maimun bin Dahlan, masyarakat Negeri Perak, tanggal 26 Februari 2019.